LAPORAN

STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN KEEROM TAHUN 2006

Diterbitkan : 2007
Data : Januari 2006 – Desember 2006

PEMERINTAH KABUPATEN KEEROM
PROVINSI PAPUA

KATA PENGANTAR

Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) memberi gambaran tentang Status Lingkungan hidup di Kabupaten Keerom pada kurun waktu satu tahun yang di sebabkan oleh berbagai kegiatan manusia. Laporan ini bertujuan untuk memperlihatkan kerterkaitan berbagai kegiatan manusia dengan alam sebagai suatu hubungan sebab akibat.

Fokus utama SLHD adalah informasi tentang kegiatan atau berbagai aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan terhadap kondisi sumber daya alam seperti air, udara, laham,hutan, keaneka ragam hayati, pesisir dan sebagainya.

Selain itu SLHD juga berisi respon pemerintah, masyarakat, LSM, swasta terhadap pengelolaan lingkungan terutama dalam mengatasi dampak, dan mendorong perbaikan kondisi sumberdaya alam dan lingkungan.

Kabupaten Keerom dalam menyusun SLHD ini masih terdapat kendala sebagai akibat dari Daerah Pemekaran Baru. Oleh karena itu saran, masukan yang membangun diharapkan dalam pembuatan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Keerom.

Terima Kasih Tuhan Memberkati

Keerom, September 2007

BUPATI KEEROM

Drs. CELSIUS WATAE

TIM PENYUSUN

1.	**Ir. Frans Tanga**	**(Ketua Tim)**
2.	**Hendy Rabang Matasik, ST**	**(Sekretaris)**
3.	**Esau Awaytouw, SH, M.Si.**	**(Anggota)**
4.	**Martha Ruru, SE**	**(Anggota)**
5.	**Nirvana Ismail, S.Sos**	**(Anggota)**
6.	**Yan Banundi, SE**	**(Anggota)**
7.	**Trisiswanda Indra N, S.Pt**	**(Anggota)**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
TIM PENYUSUN ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR GAMBAR iv

BAB I PENDAHULUAN I-1
- A. Latar Belakang I-1
- B. Tujuan I-6

BAB II KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH BERKELANJUTAN II-1
- A. Kebijakan Umum Pembangunan II-1
- B. Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup II-3
- C. Strategi Kebijakan Pembangunan Lingkungan II-3
- D. Strategi Memperkuat Basis Ekonomi II-5
- E. Strategi Penguatan dan Pemberdayaan SDM II-6
- F. Strategi Pemerataan Pembangunan II-7
- G. Strategi Pemantapan Penyediaan Sarana dan Prasarana II-8

BAB III ANALISIS ISU LINGKUNGAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN III-1
- A. Umum III-1
- B. Permasalahan Lingkungan di Daerah Pemekaran III-3
- C. Permasalahan Lingkungan di Kabupaten Keerom III-5
- D. Analisis dan Evaluasi III-5

BAB IV TINDAK LANJUT IV-1
- A. Umum IV-1
- B. Program Pemulihan Kualitas Lingkungan IV-2
- C. Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan IV-2
- D. Rincian Tindak Lanjut IV-3

DAFTAR PUSTAKA DP-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Sungai – sungai di Kabupaten Keerom III-7
Gambar 2 Pembukaan Lahan Untuk Pembangunan III-8
Gambar 3 Pengujian Air Pada Sungai yang Digunakan Oleh Masyarakat..... III-10
Gambar 4 Sumber Air di Kabupaten Keerom yang Longsor III-10
Gambar 5 Produksi Kelapa sakit di Distrik Arso III-12

BAB I
P E N D A H U L U A N

A. LATAR BELAKANG

Kabupaten Keerom merupakan Kabupaten pemekaran dari Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura yang terbentuk pada tanggal 12 April 2003 berdasarkan Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Bouven Digul, Kabupaten Asmat, Kabupaten Mappi, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Teluk Bintuni, 14 (Empat Belas) Kabupaten di Provinsi Papua (lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan lembar Negara Nomor 4245) dan sejak Bulan Oktober Tahun 2005 sudah definitive ditandai dengan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati periode 2005 , – 2010 melalui Pilkada langsung. Sebagai Kabupaten baru maka lingkungan hidup menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Keerom oleh karena itu penerapan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan harus menjadi sentral dalam penetapan kebijakan pembangunan. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kabupaten Keerom merupakan salah satu kebijakan dalam menjawab tantangan pembangunan berwawasan lingkungan. Status Lingkungan Hidup Daerah merupakan suatu informasi lingkungan, oleh karena itu informasi tentang lingkungan hidup perlu disusun sebagai bagian dari akuntabilitas publik, sarana

pendidikan dan pengawasan bagi publik, serta sarana keterlibatan publik dalam ikut berperan menentukan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup.

Camp and Dougherty (1991) dalam Mitchell (2000) menyebutkan bahwa Inti dari Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) adalah konservasi yang diimplementasikan dalam pengelolaan sumberdaya alam sehingga tujuan pembangunan berwawasan lingkungan dapat dicapai.

Pengelolaan sumberdaya alam adalah suatu upaya terencana untuk memanfaatkan sumber daya alam secara efektif dan optimal bagi kepentingan manusia. Namun pertumbuhan manusia meningkat sangat pesat, tentu saja kebutuhan akan pangan dan energi serta ruang untuk pemukiman pun meningkat tajam, akibatnya akan berdampak negatif pada sumberdaya alam dan lingkungan. Terjadinya penipisan sumberdaya alam, pencemaran dan kerusakan lingkungan yang lain, dipengaruhi oleh dinamika penduduk, pemanfaatan sumberdaya alam yang kurang bijaksana, kurang terkendalinya IPTEK, terjadinya benturan tata ruang, dan dampak negatif dari kemajuan pembangunan itu sendiri.

Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya untuk penyelamatan bumi beserta isinya dari bahaya kehancuran akibat kegiatan pengelolaan sumberdaya alam yang tidak efektif dan efisien.

Berdasarkan hal tersebut maka IUCN (1986) menyusun strategi konservasi yang disesuaikan dengan kondisi alam di Indonesia meliputi:

1. Perlindungan terhadap sistem penyangga kehidupan dengan menjamin terpeliharanya proses ekologi bagi kelangsungan hidup biota dan ekosistemnya.

2. Pengawetan keanekaragaman sumber plasma nutfah, yaitu menjamin terpeliharanya sumber genetik dan ekosistemnya bagi kepentingan umat manusia.
3. Pelestarian di dalam cara-cara pemanfaatan baik jenis maupun ekosistemnya, yaitu dengan mengatur dan mengendalikan cara pemanfaatan sehingga diharapkan dapat diperoleh manfaat yang optimal dan berkesinambungan.

Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Lingkungan dan Pembangunan (The United Conference on Environment and Development-UNCED) di Rio de Janeiro, 1992, menghasilkan beberapa strategi yang dituangkan dalam Agenda 21, yaitu beberapa deklarasi isu utama lintas sektor yang saling berkaitan. Salah satu isu penting tersebut dituangkan dalam Bab 40 tentang informasi bagi pengambil keputusan yang menggaris bawahi pentingnya kemampuan pemerintah, baik pada tingkat lokal/daerah, nasional, regional, maupun internasional untuk mengumpulkan dan memanfaatkan informasi multisektor dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan ketersediaan dan analisis data serta penyajian informasi segala aspek lingkungan hidup untuk keperluan pengambilan keputusan sebagai upaya untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan tidak akan tercapai tanpa memasukan unsur konservasi lingkungan ke dalam kerangka proses pembangunan. Kenyataan ini menggarisbawahi pentingnya laporan pengelolaan lingkungan hidup, baik pada tingkat lokal/daerah, nasional, regional, maupun global.

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Otonomi Daerah), yang kemudian disusul dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka pengelolaan lingkungan

hidup menjadi salah satu kewenangan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).

Dalam menginformasikan lingkungan hidup di daerah tersebut terdapat 2 (dua) hal yang perlu disampaikan yaitu ***kondisi lingkungan hidup beserta analisis dan kecenderungannya*** serta ***data tahunan berkala tentang lingkungan hidup, baik primer ataupun sekunder.***

Hal pertama disusun dalam laporan SLHD (sebagai penyempurnaan dari Neraca Kualitas Lingkungan Hidup Daerah atau NKLD) yang menyertakan isu regional, global dan universal. Isu global dan isu regional membutuhkan aksi di tingkat lokal dan nasional contohnya perubahan iklim dan kerusakan lapisan ozon. Hal kedua disusun dalam Basis Data Lingkungan Hidup Daerah (BDLHD), yang pada tahap awal akan merupakan data dasar bagi keperluan penyusunan laporan SLHD.

Salah satu ciri pokok dalam penyusunan laporan SLHD terletak pada kemampuan menyajikan hubungan antara bio-fisika dengan sosial ekonomi ke dalam bahasa masyarakat umum/awam. Keberhasilan pemanfaatan laporan ini terletak pada meningkatnya pengertian dan kesadaran berbagai lapisan masyarakat dalam turut mengatur, menjaga dan melindungi kelestarian lingkungannya serta masyarakat ikut berperan dalam proses pembangunan berkelanjutan.

Sementara itu, penyusunan BDLHD didasarkan pada data-data lingkungan hidup yang benar, akurat dan ilmiah. Sedangkan mutu analisis dalam laporan SLHD sangat tergantung pada transformasi data dasar menjadi suatu informasi yang berguna bagi peningkatan kesadaran dan keterlibatan masyarakat serta para pengambil keputusan dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.

Sejak 2001, penyusunan laporan NKLD di tingkat pusat telah mulai direpresentasikan ke dalam laporan SLHD dan BDLHD dengan

menggunakan metode penyusunan State of the Environment Report (SoER) yang dibuat oleh United Nation Environmental Program (UNEP) yang merupakan kriteria umum dari UNEP seperti yang tercantum di bawah ini. Hal tersebut merupakan “standarisasi dan pengaturan” yang bersifat umum dengan tidak menutup kemungkinan pengembangan kreativitas dalam memberikan informasi pendukung lainnya yang disesuaikan dengan keadaan setiap daerah.

Sesuai dengan Surat Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: B-5328 /MENLH/ 10 / 2005 Tanggal 24 Oktober 2006 bahwa penyampaian tersebut dalam bentuk Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) dan Basis Data Lingkungan Daerah dengan menggunakan metode penyusunan *State of The Environment Report* (SoER). Status Lingkungan Hidup Daerah disusun berdasarkan pada isu utama lingkungan hidup, yang terjadi di Kota Jayapura

B. TUJUAN

Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kabupaten Keerom 2006 bertujuan:

a. Menyediakan fondasi yang kuat berupa data, informasi, dan dokumentasi untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan pada semua tingkat dengan memperhatikan aspek dan daya dukung serta daya tampung lingkungan hidup daerah.
b. Meningkatkan mutu informasi tentang lingkungan hidup sebagai bagian dari sistem pelaporan publik serta sebagai bentuk dari akuntabilitas publik.
c. Menyediakan sumber informasi utama bagi Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada), Program Pembangunan Daerah (Propeda), dan kepentingan penanaman modal (investor).
d. Menyediakan informasi lingkungan hidup sebagai sarana publik untuk melakukan pengawasan dan penilaian pelaksanaan Tata Praja Lingkungan (Good Environmental Governance) di daerah sebagai landasan publik untuk berperan dalam menentukan kebijakan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan (Bangun Praja) bersama-sama dengan lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif serta sebagai sarana pendidikan untuk peningkatan kesadaran publik dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.
e. Secara khusus, mengetahui tingkat kesadaran berbagai lapisan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup tahun 2006.

BAB II
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH BERKELANJUTAN

A. KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN

Sebagai kabupaten pemekaran baru Kabupaten Keerom berupaya untuk melakukan pembangunan di segala bidang dengan program prioritas, untuk mendukung kegiatan tersebut maka visi Kabupaten adalah ”membangun jati diri sebagai identitas masyarakat Keerom” yang berarti selama 5 (lima) tahun ke depan pelaksanaan pembangunan diarahkan untuk membangun jati diri sebagai identitas masyarakat Keerom. Untuk itu Arah kebijaksanaan Umum pembangunan Kabupaten Keerom pada Tahun 2006 meliputi 4 (empat) program prioritas yaitu Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, dan Bidang Infrastuktur serta Program Penunjang lainnya. Arah kebijaksanaan pembangunan tersebut mengacu kepada UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Otonomi Daerah), yang kemudian disusul dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Untuk mencapai tujuan tersebut, walaupun banyak hambatan dan masalah yang dihadapi meliputi aspek kehidupan masyarakat yaitu masalah ekonomi, sosial budaya, sarana dan prasarana yang ditandai dengan belum stabilnya tatanan ekonomi, keuangan, pengangguran, kemiskinan yang menjurus pada ketidakberdayaan masyarakat. Dengan sejumlah masalah dasar tersebut perlu dicarikan upaya pemecahannya melalui beberapa strategi dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang sedang dan akan dihadapi.

Strategi yang digunakan dalam mewujudkan visi tersebut adalah:

1. Memperkuat basis ekonomi melalui pemerataan yang adil, aman, damai dan demokratis. Pemanfaatan sumber daya daerah efektif dan berkelanjutan serta mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;

2. Penguatan dan pemberdayaan Sumber daya Manusia (SDM) melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang maju, profesional dan mandiri;

3. Pemerataan pembangunan yaitu dengan mewujudkan masyarakat yang sejahtera, makmur dengan menciptakan kesempatan kerja yang dapat meningkat pendapatan dan daya beli masyarakat;

4. Pemantapan penyediaan sarana dan prasarana melalui pengembangan dan mempercepat pembangunan infrastruktur dasar guna mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah dengan memperhatikan tata ruang serta lingkungan hidup.

B. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HIDUP

Sebagai kabupaten baru, dengan segala macam hambatan dan kendala Kabupaten Keerom sedang giat – giatnya melaksanakan pembangunan. Kebijakan pembangunan tidak lepas dari pembangunan yang berwawasan lingkungan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Keerom sebagai instansi teknis yang menangani masalah lingkungan hidup di Kabupaten Keerom. Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Keerom adalah melaksanakan urusan desentralisasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam usaha mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yaitu salah satunya adalah terwujudnya pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan serta terciptanya efisiensi, manajemen pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.

C. STRATEGI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN LINGKUNGAN

Strategi ini diarahkan untuk mewujudkan pembangunan yang sesuai dengan tata ruang berwawasan lingkungan. Artinya dalam melaksanakan pembangunan harus mempertimbangan aspek ketataruangan serta lingkungan agar tidak terjadi masalah di masa mendatang. Tujuan yang hendak dicapai dalam kebijakan pembangunan lingkungan adalah:

1. Terwujudnya pembangunan berwawasan lingkungan.
2. Melaksanakan pengelolaan dan pemulihan, dan penanganan sumber daya alam.
3. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan Sumber Daya Manusia bagi aparatur pemerintah.
4. Memperbaiki lingkungan yang rusak/menjadi terganggu keseimbangannya agar berfungsi sebagai penyangga kehidupan dan memberikan manfaat

bagi kesejahteraan masyarakat.

5. Melaksanakan pengendalian pencemaran lingkungan hidup .
6. Melaksanakan pengawasan lingkungan hidup yang berkesinambungan.
7. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam usaha pelestarian lingkungan hidup melalui gerakan pemanfaatan lahan kritis menjadi lahan produktif.

Sejalan dengan strategi kebijaksanaan dan program pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan maka program prioritas adalah:

1. Pengendalian banjir.
2. Penataan Ruang.
3. Pembangunan dan Pembinaan Kehutanan.
4. Penyediaan dan pengelolaan Air Baku.
5. Peningkatan SDM Bidang Lingkungan Hidup bagi aparatur pemerintah.

D. STRATEGI MEMPERKUAT BASIS EKONOMI DAERAH

Strategi ini diarahkan untuk mempercepat peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dengan memacu produktifitas sektor unggulan. Penigkatan pelayanan jasa, pengembangan sarana dan prasarana dalam membuka akses terhadap wilayah – wilayah potensial dan mengembangkan kerjasama dengan pihak lain di luar Kabupaten Keerom. Starategi pembangunan ini mencakup upaya pemanfaatan sumberdaya daerah yang dimiliki. Sumberdaya alam seperti tambang atau bahan galian yang sangat potensial. Berupaya untuk menggali sumberdaya secara optimal. Tujuan yang hendak dicapai dalam memperkuat basis ekonomi daerah:

1. Peningkatan pembangunan dibidang pendidikan, kesehatan dan infratruktur yang adil antar wilayah dan kampung.
2. Pengurangan kesenjangan/ketimpangan pembangunan antar wilayah dan kampung.
3. Peningkatan ketertiban dan keamanan di seluruh wilayah Kabupaten Keerom.
4. Membina masyarakat untuk hidup rukun dan damai.
5. Mengembangkan dan memantapkan budaya yang ada pada masyarakat sehingga meningkatnya martabat dan jati diri masyarakat.
6. Meningkatkan penghargaan terhadap hak – hak adat serta hak – hak penduduk asli.
7. Menguatkan kerukunan antar golongan, etnis serta umat beragama .

E. STRATEGI PENGUATAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Strategi ini dimaksudkan untuk menciptakan pemecahan masalah kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia memecahkan masalah keterbelakangan, strategi ini diarahakan untuk membenahi peningkatan SDM, mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, strategi ini juga mengupayakan agar masyarakat yang kurang beruntung dapat meningkatkan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan hidup yaitu kebutuhan pendidikan dan kesempatan kerja.

Tujuan yang ingin dicapai dari strategi penguatan dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah:

1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan yang bermutu;

2. Meningkatnya akses terhadap kesempatan pendidikan yang lebih tinggi;

3. Meningkatnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menatagunakan segala potensi dan sumber daya yang dimiliki untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat guna meningkatkan daya saing dalam menghadapi segala tantangan dan persaingan di era globalisasi;

4. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat melalui pelatihan – pelatihan agar mampu melaksanakan pembangunan di Kampung secara matematis.

F. STRATEGI PEMERATAAN PEMBANGUNAN

Strategi ini diarahkan agar terjadi keseimbangan pertumbuhan di semua wilayah Kabupaten Keerom, serta untuk memberi ruang yang cukup bagi tumbahnya partisipasi masyarakat pada berbagai bidang pembangunan. Strategi pembangunan ini mencakup upaya pemanfaatan nilai – nilai strategis yang ada pada masyarakat. Memecahkan masalah kesenjangan antara kelompok masyarakat dan wilayah dengan memanfaatkan sumber daya dan sumber dana yang dimiliki maupun dari pemerintah atasan Provinsi dan Pusat. Mengupayakan pemberdayaan masyarakat kampung.

Tujuan yang ingin dicapai dari strategi Pemerataan Pembangunan adalah:

1. Penguatan dan pemberdayaan distrik dan kampung;
2. Penanggualangan kemiskinan;
3. Perlindungan dan kesejahteraan social;
4. Peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat;
5. Peningkatan daya saing agar mampu menguasai teknologi tepat guna untuk mengelola sumber daya alam yang dimiliki;
6. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan mendukung otonomi daerah dan kemandirian daerah;
7. Meningkatkan bantuan pemberdayaan Distrik dan Kampung utuk lebih mengembangkan prakarsa dan swadaya masyarakat kampung yang mandiri;
8. Mendorong tumbuhnya usaha – usaha masyarakat yang produktif dengan memantapkan keberadaan Koperasi Unit Desa (KUD)
9. Meningkatkan pemenuhan masyarakat kampung dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan.
10. Pengembangan pembangunan terpadu;
11. Meningkatkan kegiatan – kegiatan peran wanita melalui pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK).

G. STRATEGI PEMANTAPAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA

Strategi ini diarahkan untuk pengembangan infrastruktur guna mendukung pembangunan ekonomi, dan pengembangan wilayah diharapkan dengan pemantapan dan penyediaan sarana dan prasarasana akan mendukung dan memperkuat perekonomian daerah.

Tujuan yang ingin dicapai dari strategi Pemantapan Penyediaan Sarana dan Prasarana adalah:

1. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar kampung;

2. Tersedianya jaringan jalan yang mantap ke Distrik dan Kampung – kampung;

3. Tersedianya jaringan air bersih ke lokasi – lokasi permukiman penduduk;

4. Tersedianya jaringan /penerangan ke lokasi – lokasi permukiman penduduk;

5. Tersedianya/terpenuhinya jaringan atau fasilitas komunikasi;

6. Terbangunnya jaringan jalan lokal ke rencana pengembangan jaringan utara (primer) yang di bangun oleh Pemerintah Provinsi.

BAB III

ANALISIS ISU LINGKUNGAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN

A. U M U M

Kabupaten Keerom sebagai kabupaten pemekaran yang baru terbentuk tahun 2002, dan dengan adanya otonomi daerah menyebabkan setiap daerah mengoptimalkan sumber dayanya untuk memenuhi kebutuhan daerah itu sendiri maka Kabupaten Keerom tidak ketinggalan untuk memacu pembangunan dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya alam yang ada.

Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup mendefinisikan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya. Karenanya, harus dipahami bahwa segala aktivitas pembangunan dan segala aktivitas lainnya yang dilakukan oleh manusia akan berdampak terhadap kondisi lingkungan sekitarnya. Sedangkan pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lainnya ke lingkungan dan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam sehingga terjadi degradasi atau penurunan kualitas lingkungan sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan kurang berfungsi, atau tidak dapat lagi berfungsi, sesuai peruntukannya.

Mengingat bahwa segala aktivitas manusia akan berlangsung secara terus-menerus, maka untuk menjaga agar ada jaminan keberlanjutan segala aktivitasnya maka perlu diperhatikan aspek-aspek lingkungan dalam melaksanakan pembangunan tersebut. Sebab, pembangunan yang

dilaksanakan tanpa memperhatikan aspek lingkungan serta sumberdaya alam yang tersedia pada akhirnya, terutama dalam jangka panjang, akan mengalami hambatan yang sangat berarti bahkan suatu saat akan berhenti secara total.

Sebagai kabupaten baru, maka kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan menjadi prioritas utama bagi Kabupaten Keerom yaitu terwujudnya pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan serta terciptanya efisiensi, manajemen pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan. Pembangunan berwawasan lingkungan harus menjadi prioritas hal ini disebabkan karena berdasarkan kondisi geomorfologi Kabupaten Keerom merupakan daerah dengan morfologi perbukitan yaitu 46,64% mempunyai kelerengan $\pm$ 65% ini berarti daerah tersebut rawan longsor, disamping itu kondisi geologi Kabupaten Keerom menunjukkan Kabupaten Keerom rawan bencana. Oleh karena itu kebijakan pembangunan harus bertumpu pada pembangunan berwawasan lingkungan dalam upaya menjaga keseimbangan alam dan lingkungan hidup sehingga dapat dihindari terjadinya bencana, seperti banjir dan longsor.

Untuk maksud tersebut maka dilakukan identifikasi isu-isu lingkungan hidup yang terjadi di wilayah Kota Kabupaten Keerom. Hal ini merujuk kepada Panduan Umum Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Propinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2006, Gambaran Umum Kabupaten Keerom dan pengamatan di lapangan. Selanjutnya prioritas masalah lingkungan yang terjadi di kabupaten Keerom disusun melalui analisis yang mendalam dari data serta hasil konsultasi dengan instansi-instansi terkait di kabupaten Keerom, melalui koordinasi Bappeda Kabupaten Keerom.

B. PERMASALAHAN LINGKUNGAN DI DAEARH PEMEKARAN

Dengan adanya otonomi khusus dan pemekaran wilayah maka banyaknya daerah yang melakukan pemekaran. Sebagai daerah pemekaran kebijakan pembangunan lebih dititik beratkan pada pembangunan infrastruktur serta pembangunan ekonomi masyarakat daerah pemekaran. Pembukaan lahan untuk memenuhi syarat sebagai suatu wilayah pemerintahan menyebabkan tidak memperhatikan masalah lingkungan hidup. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat diidentifikasikan sebagai berikut:

1. Pembukaan lahan yang dianggap strategis untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana sebagai syarat terbentuknya suatu pemerintahan.
2. Pembangunan perumahan untuk permukiman.
3. Pembangunan sentra – sentra produksi.
4. Secara kasat mata tampak masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan lingkungan.
5. Pembukaan hutan untuk industri.
6. Pembukaan lahan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di daerah pemekaran
7. Pengalihan fungsi kawasan untuk pembangunan.

C. PERMASALAHAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN KEEROM

Permasalahan atau isu lingkungan hidup yang sangat menonjol dan sejak lama belum terpecahkan dengan baik di Kabupaten Keerom adalah masalah ***banjir***. Isu lingkungan di Kabupaten Keerom yang juga belum terpecahkan hingga kini adalah pengalihan ***fungsi kawasan untuk permukiman dan industri*** mengakibatkan meningkatnya lahan kritis***.*** Isu lingkungan yang berkaitan dengan ***penataan ruang*** yang digunakan sebagai acuan dalam pembangunan. Isu lingkungan yang berkaitan dengan ***sumber – sumber air bersih*** .

Dalam laporan ini, masalah banjir menjadi program prioritas hal ini

disebabkan karena sebelum terbentuk menjadi kabupaten baru beberapa wilayah seperti pada Distrik Arso dan Distrik Skamto di Kabupaten Keerom setiap tahun telah mengalami banjir tahunan, namun setiap distrik di Kabupaten Keerom akan dibahas sebagai berikut:

1. Distrik Arso, isu lingkungan yang menonjol, yakni:
    a. Sebagai pusat pemerintahan pada Kabupaten Keerom maka pembukaan lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana menjadi prioritas tanpa mempertimbangkan fungsi kawasan.
    b. Banjir tahunan di wilayah Arso Kota.
    c. Penebangan dan pembakaran hutan yang akan digunakan untuk perladangan yang mengakibatkan terjadinya lahan kritis.
    d. Sumber air bersih yang belum memenuhi standar kesehatan.
    e. Pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit.

2. Distrik Skamto, isu lingkungan yang menonjol, yakni:
    a. Banjir tahunan.
    b. Pembukaan lahan untuk pertanian dan perkebunan .
    c. Sumber air yang belum memenuhi standar kesehatan.

3. Distrik Waris, isu lingkungan yang menonjol, yakni:
    a. Pembukaan lahan untuk industri kehutanan, permukiman karena merupakan daerah perbatasan negara antara Indonesia dan Papua New Guinea.
    b. Pembukaan lahan tanpa mempertimbangkan peruntukaannya.

4. Distrik Senggi, isu lingkungan yang menonjol, yakni:
    a. Pembukaan lahan untuk industri kehutanan, serta peladangan berpindah.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa isu-isu lingkungan yang ada di Kabupaten Keerom, selama 2006, adalah:

1. Isu Banjir
2. Isu Pembukaan lahan untuk sarana dan prasarana
3. Isu Perladangan berpindah dengan cara menebangi pohon.
4. Isu sumber air bersih yang belum memenuhi standar kesehatan
5. Isu Pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit
6. Isu Penata Ruangan untuk Pembangunan berwawasan Lingkungan

D. ANALISIS DAN EVALUASI

1. Isu Banjir

Banjir merupakan fenomena alam yang dapat terjadi baik pada sungai yang memiliki aliran sepanjang tahun maupun pada sungai yang memiliki aliran hanya pada musim penghujan saja dan umumnya banjir terjadi di dataran rendah yang merupakan dataran banjir (flood plain) dan berada pada bagian hilir atau ruas tengah dan bawah dari alur sungai. Banjir ditimbulkan oleh kejadian alam dan atau sebagai aktifitas manusia. Banjir akbat kejadian alam disebabkan karena curah hujan yang tinggi, kapasitas alur sungai yang tidak mencukupi, aliran anak sungai tertahan oleh aliran induknya, sehingga terjadi akumulasi debit puncak banjir sungai pada waktu yang sama, terjadinya pembendungan air sungai di muara akibat pasang air laut, serta akibat adanya faktor geometri alur sungai berupa belokan – belokan (meandering river). Sedangkan akibat aktifitas manusia meliputi penebangan pada hulu – hulu sungai, adanya aktifitas pada hulu sungai menyebabkan tingginya sedimentasi pada sungai, pengembangan daerah permukiman di sepanjang tepi alur sungai, adanya perubahan tata guna lahan di Daerah Pengaliran Sungai (DPS)

yang menyebabkan aliran permukaan (run off) menjadi besar, bantaran sungai yang dimanfaatkan sebagai tempat permukiman serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah. Berdasarkan penyebab banjir maka banjir dapat dibedakan menjadi banjir limpasan dan banjir genangan. Berdasarkan pengertian di atas masalah banjir yang terjadi setiap tahun di Kabupaten Keerom terutama di Distrik Arso dan Distrik Skanto disebakan oleh fenomena alam dan akibat aktifitas manusia. Banjir akibat fenomena alam di Kabupaten Keerom terutama akibat dari kondisi topografi dan kondisi geologi maka wilayah tersebut sangat rentan terhadap bencana banjir dan juga longsor sedangkan akibat aktifitas manusia, karena merupakan daerah pemekaran baru maka penggunaan lahan terutama untuk pembangunan sarana dan prasarana dan permukiman. Upaya untuk mengatasi masalah banjir harus bersifat komprehensif yaitu fisik dan non fisik. Upaya pengendalian banjir secara fisik adalah membuat bangunan pengendali banjir dan melengkapi bangunan pengendali banjir sedangkan upaya pengendali banjir secara non fisik seperti pengelolaan dataran banjir agar dapat mengantisipasi bila debit banjir terlampaui, penetapan sempadan sungai, pemberian penyuluhan kepada masyarakat tentang banjir bagi masyarakat, penegakan hukum dan pengelolaan sampah.

Sungai – sungai yang ada di kabupaten Keerom merupakan sungai yang besar. Sungai – sungai tersebut jika banjir akan yang mengangkut material, sedimen serta batang pohon, inilah mengakibatkan banjir yang terjadi di Distrik Arso dan Distrik Skanto sepanjang tahun. Banjir yang terjadi di Kabupaten Keerom

Pada tahun 2006 Bappeda Kabupaten Keerom melakukan kegiatan dalam rangka mengantisipasi banjir yaitu dengan melakukan pemeliharaan/normalisasi sungai Skanto dan sungai Tami, penataan jaringan rawa/pengendalian banjir serta membuat master plan penanggulangan banjir.







Gambar: Sungai – sungai di Kabupaten Keerom yang membawa Sedimen dan kayu - kayu Yang menyebabkan banjir di Distrik Arso dan Distrik Skanto

2. Isu Pembukaan lahan untuk sarana dan prasarana

Pembukaan lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana merupakan konsekuensi bagi daerah pemekaran. Pembangunan sarana dan prasarana kebanyakan memilih lokasi yang strategis terutama untuk perkantoran dan perumahan pegawai, pembangunan jalan dan jembatan dengan membuka daerah – daerah baru dengan melewati hutan dan berdasarkatan data hutan yang ada di Kabupaten Keerom luasnya mencapai 841.857 Ha atau 71,51% dengan peruntukan sebagai Hutan Lindung (329.370,09 Ha), Hutan Produksi (124.222,55 Ha), Hutan Produksi Konversi (216.814,75 Ha), Hutan Produksi Terbatas (168.959,03Ha), Kawasan Suaka Alam/Pelestarian Alam (2.490,54 Ha) dan Areal Penggunaan Lain (APL) (100.300,35 Ha). Pembangunan sarana dan prasarana menjadi masalah jika tidak mempertimbangkan kondisi lingkungan mengingat topografi dan kondisi geologi Kabupaten Keerom yang sangat memungkinkan untuk terjadi bencana banjir dan tanah lonsor.

Oleh karena itu untuk meminimalkan terjadinya bencana pada Tahun 2006 telah melakukan master plan jalan dan jembatan maksudnya agar pembangunan jalan dan jembatan mempertimbangkan lingkungan, melakukan studi pengembangan sarana perkotaan dan ketataruangan agar pembangunan yang dilaksanakan benar – benar mempertimbangkan lingkungan.





Gambar: Pembukaan lahan untuk membangun sarana dan prasarana untuk Itulah diperlukan RTRW Kabupaten Keerom

3. Isu Perladangan berpindah dengan cara menebangi pohon

Pembukaan lahan untuk pemenuhan kebutuhan sehari – hari menjadi kebutuhan pokok bagi setiap masyarakat. Pemenuhan kebutuhan sehari – hari melalui sektor pertanian yang merupakan sektor yang memberikan kontribusi paling besar perekonomian di Kabupaten Keerom. Pemanfaatan lahan pertanian untuk tanaman pangan meliputi padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang panjang, bawang merah, bayam, kangkung, cabe, pisang dan sayur lilin dengan memanfaatkan lahan 4.429 Ha untuk pertanian dan hortikultura. Pemanfaatan lahan tersebut menjadi masalah yang serius jika dilakukan perladangan berpindah, hal ini disebabkan karena sistem pertanian yang dilakukan dengan sistem tradisional. Sistem tradisional dengan perladangan berpindah menjadi sangat beresiko mengingat Kabupaten Keerom merupakan daerah rawan banjir, jika perladangan berpindah dilakukan denga menebang hutan maka akan menimbulkan bencana banjir dan tanah longsor.

Untuk itu pada tahun 2006 ini untuk menghindari hal tersebut telah dilakukan budidaya tanaman pangan dan hortikultura dengan menerapakan teknologi modern terutama pada daerah – daerah transmigrasi yaitu Distrik Arso dan Distrik Skanto.

4. Isu sumber air bersih yang belum memenuhi standar kesehatan

Air bersih merupakan kebutuhan yang harus di penuhi, namun berdasarkan tatanan geohidrologi Kabupaten Keerom maka ground water (air bawah permukaan) di Kabupaten keerom dibagi menjadi tiga yaitu mandala air tanah daratan yang berada pada dataran rendah Tami dan dataran rendah Senggi, mandala air tanah batugamping tersebar di sekitar daerah perbatasan papua New Guinea, air sangat terbatas pada rekahan, celahan maupun saluran pelarutan dan mandala air tanah perbukitan menempati bagian selatan dataran Tami.

Dengan tiga tatanan groundwater tersebut maka untuk memenuhi standar air bersih bagi masyarakat Kabupaten Keerom maka pada tahun 2006 ini telah dilakukan survey terhadap sumber – sumber air bersih, dan pemasangan intake.





Gambar: Pengujian Air pada sungai yang digunakan oleh masyarakat untuk Kebutuhan sehari – hari.





Gambar: Sumber Air di Kabupaten Keerom yang longsor pada tebing Sungai

5. Isu Pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit

Perkebunan Kelapa Sawit dan Kakao merupakan kegiatan perkebunan yang memiliki area lahan terluas yaitu lebih dari 16.000 ha atau mencapai lebih dari 97% luas lahan total tanaman perkebunan di Kabupaten Keerom. Pada Tahun 2005 komoditas Kelapa Sawit telah memberikan tanaman panen dengan luas 10.195 ha, sedangkan Kakao seluas 2.584 ha dengan produksi mencapai 4.833 ton.

Berdasarkan potensi lahan yang ada, komoditas perkebunan sangat potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Keerom, terutama komoditas yang banyak diminta pasar internasional (eksport) seperti Kelapa Sawit (CPO) dan Kakao. Disamping itu, komoditas tersebut mampu menggerakkan industri berbasis pertanian (agro industri) dan menyerap banyak tenaga kerja baik pada *on farm* maupun *off-farm*.

Informasi mengenai sub-sektor perkebunan disajikan pada Tabel berikut:

Luas Lahan dan Produksi Tanaman Perkebunan Kabupaten Keerom Tahun 2005

No.	Komoditas	Luas Lahan (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)
1	Kelapa Sawit	11.921	10.195	Tidak ada data
2	Kakao	4.163	2.584	4.833
3	Kelapa Dalam	268	99	Tidak ada data
4	Pinang	141	79	Tidak ada data
5	Vanili	34	7	Tidak ada data
6	Kopi	19	9	Tidak ada data
	Jumlah	**16.545**	**12.974**	**4.833**

Sumber: Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Keerom (2006)

Perkebunan kelapa sawit merupakan penggerak ekonomi yang sangat efektif karena sangat membutuhkan banyak pekerja. Namun menjadi masalah jika perkebunan kelapa sawit tersebut tidak dirawat dengan baik karena akan menjadikan lahan kritis yang sangat rawan bagi lingkungan.



Gambar: Produksi Kelapa Sawit di Distrik Arso yang sangat menguntungkan

Namun pembukaan lahan besar – besaran untuk perkebunan kelapa sawit akan berdampak negative pada lingkungan. Inilah yang harus di jaga dan diminiimalisir dampak negative yang akan timbul.

6. Isu Penata Ruangan untuk Pembangunan Berwawasan Lingkungan

Sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih besar di dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan sumber daya yang tersedia di wilayahnya dengan tetap memelihara dan menjaga ekosistem dan kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan yang berlaku termasuk juga didalamnya mengenai penataan ruang. Wewenang Pemerintah Daerah dalam hal penataan ruang adalah menyelenggarakan penataan ruang daerahnya yang didalamnya terdapat unsur perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Sedangkan wewenang Pemerintah Pusat adalah dalam hal pengaturan penataan ruang dan berperan dalam hal memfasilitasi dan melakukan bentuk pengawasan dan pengendalian tata ruang dalam skala nasional.

Sebagai upaya dalam menterpadukan program pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam sehingga tercipta suatu pembangunan yang berkelanjutan, pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk menyusun suatu rencana tata ruang yang dapat menjadi acuan/pegangan dalam pembangunan wilayah. Produk rencana tata ruang tersebut harus dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan dalam pembangunan wilayah. Produk rencana tata ruang tersebut harus dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan telah menjadi kesepakatan semua *stakeholders* di daerah.

Dampak yang timbul adalah tidak terpadunya pembangunan dan tumpang tindihnya pemanfaatan ruang yang mengakibatkan timbulnya dampak negatif perkembangan wilayah seperti munculnya kawasan kumuh, kemacetan lalu lintas, banjir, longsor, perambahan hutan dan sebagainya.

Beberapa hal yang menjadi pertimbangan diperlukannya RTRW Kabupaten Keerom, antara lain adalah:

1. Penyebaran penduduk yang tidak merata dan kemiskinan.

   Masalah distribusi penduduk yang tidak merata dengan konsentrasi yang umumnya terjadi di daerah perkotaan, namun pertumbuhan penduduk di wilayah ini cukup kecil dan cenderung terjadi eksodus keluar wilayah karena adanya kemiskinan terutama di daerah terpencil.
2. Penyediaan sarana dan prasarana yang belum memadai

   Belum terlayaninya sarana dan prasarana, seperti air bersih, listrik, dan lain-lain untuk seluruh masyarakat, serta belum tuntasnya sistem drainase yang mengakibatkan banjir, merupakan isu pembangunan yang penting di Kabupaten Keerom. Salah satu contoh masalah adalah besarnya animo dan prestasi dari masyarakat yang terus meningkat dibandingkan dengan penyediaan sarana dan prasarananya di bidang olahraga, masih belum tertangani secara optimal.
3. Perlunya perhatian terhadap kondisi sumber daya alam dan lingkungan dalam upaya menjaga keseimbangan alam dan lingkungan hidup sehingga dapat dihindari terjadinya bencana, seperti banjir dan longsor.
4. Perlunya perhatian antar negara terhadap kawasan perbatasan.
5. Perlu ditingkatkan kerjasama antar pemerintah daerah kabupaten lain dan Negara Papua New Guinea sehubungan dengan jauhnya lokasi Kabupaten Keerom dari pusat-pusat pemerintahan di Provinsi Papua untuk dapat saling mempengaruhi baik secara fisik, sosial, ekonomi dan aspek-aspek lainnya dengan saling menguntungkan.
6. Belum tertatanya sistem pengaturan transportasi yang memadai.
7. Belum adanya acuan untuk koordinasi antar instansi didalam proses pelaksanaan pembangunan.

Konsep yang akan dipakai dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Keerom yang secara garis besar mencakup 2 (dua) hal yaitu:

1. **Pemantapan Kawasan Lindung,** yang dilakukan dengan pengendalian aktivitas tertentu yang dapat mengurangii fungsi lindung kawasan tersebut. Pengembangan tertentu tersebut antara lain penyebaran dan pemadatan penduduk, penebangan hutan, akan mengurangi perlindungan lahan.
2. **Pengembangan Kawasan Budidaya,** yang dilakukan demi peningkatan kesejahteraan penduduk tanpa mengorbankan kelestarian alam. Dalam kawasan budidaya Kabupaten Keerom terdapat bermacam kegiatan, antara lain pertanian tanaman pangan, perkebunan, konservasi dan permukiman termasuk di dalamnya dan lain sebagainya. Kawasan budidaya ini perlu diintensifkan pemanfaatannya secara kuantitatif maupun kualitatif dengan pemantauan dan pengendalian yang mengurangi konflik antar kegiatan yang mempunyai dampak negatif.

Konsep penataan ruang inilah yang digunakan sebagai rambu – rambu dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Keerom namun sebagai daerah pemakaran yang baru Kabupaten Keerom belum mempunyai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Keerom, mengingat kabupetan Keerom secara geologi sangat rawan terhadap bencana, maka pada Tahun 2007 akan direncanakan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Keerom yang digunakan sebagai acuan dalam meletakkan dasar – dasar pembangunan di Kabupaten Keerom.

BAB IV
TINDAK LANJUT

A. UMUM

Pembangunan berwawasan lingkungan harus merupakan pedoman bagi pemerintah dalam pengambilan kebijakan pembangunan. Sustainable development menjadi pola pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, maka untuk mengantisipasi pembangunan di Kota Jayapura diperlukan suatu arahan kebijaksanaan dalam pelestarian lingkungan, pemulihan kualitas lingkungan dan pengendalian kerusakan lingkungan. Secara umum, hal ini dapat diwujudkan dengan:

1. Mempertahankan kondisi lingkungan dengan melakukan pembangunan berwawasan lingkungan dengan memperhatikan keberadaan flora dan fauna.
2. Meningkatkan konservasi sumber daya alam hayati, termasuk flora dan fauna guna melindungi dan menjamin kesinambungan keberadaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman hayati.
3. Meningkatkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dengan pengembangan pola tata ruang yang menserasikan tata guna tanah, air serta sumber daya alam dalam satu kesatuan yang dinamis serta ditunjang oleh perkembangan penduduk yang serasi.
4. Meningkatkan mutu lingkungan hidup dengan memanfaatkan sumberdaya alam secara berkelanjutan, merehabilitasi kerusakan, mengendalikan pencemaran dan meningkatkan kualitas lingkungan.
5. Menumbuhkembangkan kesadaran di kalangan masyarakat dan aparatur pemerintah mengenai pentingnya pelestarian lingkungan hidup dalam kehidupan manusia melalui penerangan dan pendidikan, pemberian

penghargaan, penegakan hukum, dan mendorong peran aktif masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Selanjutnya, berbagai akibat pembangunan yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup perlu ditangani secara cermat dan terencana dengan melibatkan seluruh komponen kekuatan yang ada. Upaya-upaya yang dapat dilaksanakan adalah:

B. PROGRAM PEMULIHAN KUALITAS LINGKUNGAN

Program ini dimaksudkan guna mengevaluasi kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan, penurunan beban pencemaran lingkungan serta menstabilkan dan meningkatkan daya dukung lingkungan. Hal ini antara lain dilakukan melalui kegiatan:

1. Penghijauan yaitu penanaman pohon pelindung, pohon produktif dan pohon atau tanaman hias lainnya.
2. Rehabilitasi dan pengembalian fungsi situ dan daerah sekitar situ sebagai satu kawasan lindung yang berfungsi sebagai tandon air.
3. Penerapan pembuatan sumur resapan sejalan dengan pendirian bangunan guna mengantisipasi kekeringan air tanah dan instrusi air laut akibat pemanfaatan air tanah yang tidak seimbang dengan ketersediaannya.
4. Pembebasan sempadan sungai dari permukiman dan yang lainnya yang menyebabkan fungsi sempadan sungai sebagai penahan longsor menjadi tidak sempurna dan menggantinya dengan penanaman pohon-pohon pelindung guna mengembalikan fungsi sempadan sungai.
5. Meningkatkan pengelolaan daerah aliran sungai dengan upaya pengendalian kualitas air sungai sesuai baku mutu yang ditetapkan.

C. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN

Program ini dimaksudkan untuk menekan dan mengurangi tingkat pencemaran terhadap lingkungan dengan pembinaan terhadap sumber-sumber pencemaran (industri dan kegiatan usaha lainnya) agar mengolah limbah yang dikeluarkan sebelum membuangnya ke lingkungan sebagai satu-satunya tempat yang ada di dunia untuk menampung segala bentuk limbah baik di tanah, di air maupun di udara.

D. RINCIAN TINDAK LANJUT

Progam-program yang dikemukakan di atas bersifat umum, sedang yang bersifat khusus adalah yang berkaitan isu-isu lingkungan sebagaimana yang dikemukakan dalam Bab III. Hal ini dimaksudkan untuk memulihkan kondisi lingkungan sekaitan dengan isu-isu tersebut.

1. Tentang Isu Banjir

Masalah banjir adalah masalah yang sepanjang tahun selalu terjadi di Kabupaten Keerom. Oleh karena itu kabupaten Keerom melalui program ke depan akan melaksanakan beberapa kegiatan yang dapat menanggulangi banjir antara lain:

- Program pengelolaan dan konservasi Sungai, Danau dan sumber air lainnya dengan kegiatan:
    - Pemeliharaan/Normalisasi sungai skamto dan Sungai Tami
    - Pembuatan talud pada jembatan Sungai Waisamba
- Program Pengendalian Banjir
    - Penataan jaringan rawa/pengendalian banjir
- Program Penataan Ruang
    - Master plan penanggulangan Banjir di Arso dan Skamto
    - Pembuatan desain jaringan drainase

Program – program inilah yang akan diterapkan pada tahun depan untuk mengurangi serta mengantisipasi banjir tahunan yang terjadi di Kabupaten Keerom.

a. Aspek Keterlibatan Masyarakat

- Melibatkan RT/RW di setiap kelurahan untuk menggalakkan menanam pohon di sekitar pekarangan rumah
- Menghimbau setiap warga untuk untuk tidak melakukan penebangan serta perladangan berpindah pada daerah – daerah perbukitan.
- Menghimbau kepada masyarakat agar tidak membangun di sempadan sungai.

b. Aspek Pemerintah

- Memberikan sanksi hukum yang tegas apabila melanggar ketataruangan
- Melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan bahaya banjir.
- Membuat papan informasi sebagai himbuan kepada masyaraka.

2. Tentang Isu Pembukaan Lahan untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana

Sebagai Daerah Pemekaran baru, Kabupaten keerom sekarang ini sedang berpacu dalam pembangunan. Pembukaan lahan untuk pembangunan infrasuktur dan sarana prasarana menjadi hal yang biasa terjadi. Oleh karena itu untuk meminimalkan terjadinya bencana pada Tahun 2006 telah melakukan master plan jalan dan jembatan maksudnya agar pembangunan jalan dan jembatan mempertimbangkan lingkungan, melakukan studi pengembangan sarana perkotaan dan ketataruangan agar pembangunan yang dilaksanakan benar – benar mempertimbangkan lingkungan.

3. Tentang Isu Perladangan Berpindah

Sebagai masyarakat peramu yang masih bergantung dengan alam/ hutan dalam pemenuhan kebutuhan pokok, maka perladangan berpindah menjadi hal yang biasa. Namun menjadi kendala apabila perladangan berpindah tersebut melakukan penebangan dan pembakaran hutan sebagai kawasan konservasi. Oleh karena itu pada tahun ke depan akan dilakukan kegiatan

- Sosialisasi terus menerus kepada masyarakat akan bahaya perladangan berpindang dengan cara menebang dan membakar hutan;
- Memberikan solusi serta alternatif lain untuk melakukan aktifitas perladangan yang berwawasan lingkungan.
- Menyediakan lahan untuk dijadikan ladang/kebun pada daerah yang sesuai untuk ladang/kebun rakyat.

4. Tentang Penyediaan sumber Air Bersih sesuai Standar

Air bersih sebagai salah satu kebutuhan pokok manusia harus dapat dijamin tentang kualitasnya. Untuk itu dilakukan program penyediaan dan pengelolaan air baku yang bertujuan agar air yang di minum oleh masyakat di Kabupaten Keerom sesuai dengan standar kesehatan.

Adapun kegiatan yang dilakukan adalah:

- Penyediaan air bersih bagi masyarakat
- Survey sumber air bersih
- Pemasangan intake dan pengadaan pipa air bersih.

E. PENUTUP

Dalam merealisasikan program-program di atas pemerintah Kabupaten Keerom memerlukan dukungan dari seluruh komponen masyarakat, lembaga pendidikan, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat yang merupakan ujung tombak di lapangan. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup diKabupaten Keerom diupayakan dalam setiap kesempatan baik dalam forum formal dalam pelaksanaan pelatihan, penyuluhan, lokakarya atau lainnya maupun secara informal melalui pertemuan-pertemuan di tempat ibadah, lingkungan tempat tinggal dan lain sebagainya.

Penyebaran informasi tentang lingkungan perlu terus dilaksanakan guna menambah wawasan masyarakat sebagai stakeholder pembangunan akan pentingnya keberadaan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang sehingga diharapkan pembangunan yang dilaksanakan guna memenuhi kebutuhan masyarakat pada umumnya dapat terlaksana maksimal dengan tanpa menimbulkan permasalahan lingkungan lainnya yang mengarah kepada kehancuran.

DAFTAR PUSTAKA

Asisten Deputi Urusan Informasi Deputi Urusan Data dan Informasi Deputi Bidang Pembinaan Sarana Teknis dan Peningkatan Kapasitas Kementrian Lingkungan Hidup Kementrian Lingkungan Hidup, 2006, *Panduan Umum Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Propinsi dan Kabupaten Kota Tahun 2006*, Jakarta

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Keerom, 2006, Kabupaten Keerom

Susilo, K., 2000, *Kebijakan Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah Dalam Mendukung Pembangunan Kelautan dan Perikanan. Paper Presented at National Workshop of Department of Exploration and Fishery*, Jakarta.